



Bebas dan Berdaya: Transformasi Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Pelatihan Akuntansi dan Kewirausahaan

Free and Empowered: The Transformation of Correctional Inmates Through Accounting and Entrepreneurship Training

Ester Melania Pasamba¹, Trisna Sary Lewaru², Yohana Magdalena Kalorbobir³, Yustinus Lambyombar⁴, Yohanes Z. Warkula⁵, Piter Arson Welay⁶, Stivan Harry Uniberua⁷
Program Studi Di luar Kampus Utama Kabu.paten Kepulauan Aru Universitas Pattimura^{1,2,3,4,5,6,7}
Email Korespondensi: estermasamba@gmail.com✉

Histori Artikel

Masuk: 16-02-2025 | Diterima: 30-03-2025 | Diterbitkan: 01-05-2025

Abstrak

Reintegrasi warga binaan ke masyarakat sering terhambat oleh rendahnya keterampilan dan stigma sosial, yang memicu pengangguran dan risiko residivisme. Program ini bertujuan memberdayakan warga binaan di Lapas X melalui pelatihan akuntansi dasar dan kewirausahaan guna meningkatkan kemandirian ekonomi. Kegiatan dilaksanakan dalam tiga tahap: identifikasi kebutuhan, pelatihan intensif selama satu bulan, dan evaluasi melalui pretest-posttest serta pendampingan. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 82% dalam pengelolaan keuangan dan 75% dalam perencanaan bisnis. Sebanyak 60% peserta berminat membuka usaha pasca-bebas, dan 15% telah memulai usaha mikro di dalam Lapas. Program ini juga mendorong kolaborasi antara Lapas, perguruan tinggi, dan dinas terkait untuk dukungan permodalan dan pembinaan lanjutan. Tantangan utama meliputi keterbatasan waktu pelatihan dan beragamnya latar belakang peserta. Pelatihan terbukti efektif sebagai strategi pemberdayaan warga binaan dan mendukung SDGs poin 8 (Pekerjaan Layak) dan 16 (Perdamaian Inklusif).

Kata Kunci: Warga Binaan; Akuntansi Dasar; Kewirausahaan; Reintegrasi; Pemberdayaan Ekonomi.

Abstract

The reintegration of correctional inmates into society is often hindered by limited skills and social stigma, leading to unemployment and the risk of recidivism. This community service program aimed to empower inmates at Correctional Facility X through basic accounting and entrepreneurship training to enhance economic self-reliance. The program was implemented in three stages: needs assessment, one-month intensive training, and evaluation through pretest-posttest and post-training mentoring. Results showed a 82% increase in participants' understanding of financial management and a 75% improvement in business planning. Approximately 60% expressed strong interest in starting a business after release, with 15% already engaged in micro-enterprises within the facility, such as handicraft and food production. The program also fostered collaboration between the correctional facility, higher education institutions, and local government agencies for access to capital and continued entrepreneurship support. Key challenges included limited training time and diverse educational backgrounds. The training proved effective as an inmate empowerment strategy and supports SDGs Goal 8 (Decent Work) and Goal 16 (Inclusive Peace).

Keywords: Inmates; Basic Accounting; Entrepreneurship; Reintegration; Economic Empowerment.

This is an open access article under the CC BY-SA license



PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Namun, tantangan terbesar yang dihadapi oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) setelah bebas adalah reintegrasi sosial dan ekonomi. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2022) menunjukkan bahwa sekitar 60% mantan narapidana kesulitan mendapatkan pekerjaan, sehingga rentan terjerumus kembali dalam tindak kriminal (recidivism).

Menurut penelitian dari Sampson dan Laub (1993), faktor utama yang memengaruhi keberhasilan reintegrasi adalah kesempatan kerja dan keterampilan yang memadai. Tanpa bekal keterampilan yang memadai, WBP seringkali mengalami stigmatisasi dan penolakan dari masyarakat, sehingga mempersulit proses pemulihan kehidupan mereka (Maruna, 2001). Oleh karena itu, pelatihan keterampilan seperti akuntansi dan kewirausahaan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.

Pelatihan akuntansi dasar dapat membantu WBP memahami pengelolaan keuangan, yang merupakan fondasi penting dalam menjalankan usaha kecil (Hisrich, Peters, & Shepherd, 2017). Sementara itu, pelatihan kewirausahaan dapat mendorong kemandirian ekonomi dengan membuka peluang usaha mandiri. Penelitian oleh Kuratko (2020) menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan individu dalam memulai bisnis, termasuk bagi kelompok marginal seperti mantan narapidana.

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan WBP melalui pelatihan akuntansi dan kewirausahaan, sehingga mereka memiliki bekal untuk menciptakan lapangan kerja sendiri atau bekerja di sektor formal. Pendekatan partisipatif digunakan agar peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam simulasi bisnis dan praktik langsung. Melalui metode ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan kepercayaan diri WBP dalam mengelola usaha (Bandura, 1997). Selain itu, program ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 8, yaitu "Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi", serta nomor 16, yaitu "Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat" (United Nations, 2015). Dengan memberikan keterampilan yang aplikatif, diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran di kalangan mantan WBP dan menekan angka *recidivism*.

Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga menjadi langkah transformatif dalam memutus siklus kriminalitas melalui pemberdayaan ekonomi. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, LSM, dan dunia usaha, sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program ini.

METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan warga binaan pemasyarakatan (WBP), petugas Lapas, serta akademisi. Metode pelaksanaan dirancang secara sistematis untuk memastikan efektivitas program, mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi akhir. Tahapan pertama dimulai dengan pembentukan tim pelaksana yang terdiri dari dosen akuntansi, mahasiswa, serta perwakilan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kolaborasi multidisiplin ini bertujuan agar materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan WBP. Dalam pelaksanaan, dosen dan praktisi bertanggung jawab menyusun modul pelatihan dan memberikan pendampingan teknis, mahasiswa berperan dalam mendampingi peserta dan mendokumentasikan kegiatan, sementara perwakilan Lapas membantu koordinasi serta memastikan bahwa program sejalan dengan ketentuan internal. Pembagian tugas dilakukan melalui rapat koordinasi awal, yang mengacu pada prinsip *community-based participatory research* (CBPR) (Israel et al., 2012), dengan menekankan kolaborasi aktif antara peneliti dan komunitas sasaran.

Langkah selanjutnya adalah survei lokasi dan kebutuhan (*need assessment*) yang dilakukan sebelum pelatihan, bekerja sama dengan petugas pembinaan Lapas. Survei ini menggunakan kombinasi metode wawancara mendalam dengan 10 WBP dan 5 petugas Lapas, penyebaran kuesioner untuk menilai pemahaman dasar akuntansi dan minat berwirausaha, serta analisis data sekunder dari profil WBP yang tersedia di Lapas. Hasilnya menunjukkan bahwa 75% WBP memiliki minat dalam kewirausahaan, namun belum memiliki pengetahuan dasar terkait pengelolaan

keuangan (Lapas X, 2023). Temuan ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan materi pelatihan.

Untuk menunjang keberhasilan program, tim pengabdian menyiapkan sarana dan administrasi pendukung, seperti modul pelatihan yang mencakup Akuntansi Dasar termasuk pencatatan keuangan sederhana, laporan laba rugi, dan arus kas (Warren et al., 2021)—dan modul Kewirausahaan yang meliputi pembangunan *mindset* usaha, analisis pasar, dan strategi pemasaran (Scarborough & Cornwall, 2019). Selain itu, disiapkan alat pelatihan seperti laptop, proyektor, buku catatan, dan contoh laporan keuangan UMKM. Perizinan dan koordinasi dengan pihak Lapas juga dilakukan untuk mendapatkan persetujuan kegiatan dan daftar peserta.

Sebelum pelatihan dimulai, dilakukan penyusunan rancangan sosialisasi untuk memastikan peserta memahami manfaat program. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan penyampaian materi secara interaktif dengan bantuan video inspiratif tentang mantan WBP yang berhasil menjadi wirausaha, diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk mengeksplorasi harapan dan kekhawatiran peserta, serta simulasi bisnis sederhana di mana peserta diajak mempraktikkan transaksi jual-beli disertai pencatatan keuangan. Dalam proses ini, pendekatan *experiential learning* (Kolb, 2014) diterapkan agar peserta memperoleh pengalaman belajar yang konkret.

Pelaksanaan pelatihan dilakukan secara tatap muka di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Dobo. Tim pengabdian menggunakan metode presentasi interaktif dengan bantuan teknologi seperti laptop dan *infocus* untuk menyampaikan materi mengenai pentingnya pengelolaan keuangan. Diskusi kelompok juga dilakukan agar peserta dapat berbagi pengalaman dan menyelesaikan studi kasus terkait literasi akuntansi dan kewirausahaan.

Evaluasi program dilakukan dalam dua bentuk, yaitu *feedback* langsung dari peserta melalui kuesioner kepuasan dan wawancara mendalam, serta pemantauan jangka panjang yang bertujuan untuk melacak perkembangan usaha mantan WBP setelah bebas. Evaluasi ini penting untuk menilai dampak berkelanjutan program dan menjadi dasar penyempurnaan kegiatan serupa di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pelatihan akuntansi dan kewirausahaan bagi warga binaan pemsarakatan (WBP) menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman keuangan dan motivasi berwirausaha. Hal ini sejalan dengan penelitian Warren *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa pelatihan akuntansi dasar dapat meningkatkan literasi keuangan kelompok marginal, termasuk narapidana. Selain itu, 70% peserta menyatakan minat yang kuat untuk memulai usaha kecil setelah bebas, menunjukkan bahwa pelatihan ini berhasil membangun kepercayaan diri mereka dalam berwirausaha. Temuan ini memperkuat pendapat Kuratko (2020) bahwa pendidikan kewirausahaan efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi, terutama bagi individu yang kesulitan mengakses lapangan kerja formal.

Dalam pelaksanaannya, metode pembelajaran partisipatif melalui simulasi bisnis terbukti efektif meningkatkan keterlibatan peserta. WBP tidak hanya menerima materi secara teoritis tetapi juga langsung mempraktikkan pembukuan sederhana dan merancang model bisnis. Pendekatan *experiential learning* (Kolb, 2014) ini membantu peserta memahami konsep dengan lebih baik karena mereka belajar dari pengalaman langsung. Misalnya, salah satu peserta yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan akuntansi mampu membuat catatan keuangan untuk usaha kerajinan tangan yang direncanakannya. Hasil ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis praktik lebih sesuai untuk WBP dibandingkan metode ceramah konvensional.

Kolaborasi dengan berbagai pihak juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Dukungan dari Lembaga Pemasarakatan (Lapas) memungkinkan pelaksanaan pelatihan berjalan lancar, sementara keterlibatan Dinas Koperasi dan UMKM setempat membuka akses permodalan bagi peserta yang

ingin memulai usaha setelah bebas. Menurut Israel et al. (2012), kolaborasi multipihak dalam program pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang. Dalam konteks ini, kerja sama dengan dunia usaha juga diperlukan agar mantan WBP dapat memasarkan produk mereka tanpa diskriminasi.

Di sisi lain, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu pelatihan dan heterogenitas latar belakang pendidikan peserta. Sebagian WBP memiliki pendidikan rendah sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih sederhana dalam penyampaian materi. Namun, hal ini diatasi dengan menggunakan media visual dan contoh kasus nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendampingan pascapelatihan melalui mentoring online membantu peserta terus mengembangkan usaha mereka. Temuan ini sesuai dengan penelitian Maruna (2001) yang menyatakan bahwa dukungan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mencegah mantan narapidana kembali ke jalan kriminal akibat kegagalan ekonomi.

Dari segi dampak sosial, program ini tidak hanya memberdayakan WBP secara ekonomi tetapi juga mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana. Beberapa peserta melaporkan bahwa keluarga mereka mulai memberikan dukungan setelah melihat adanya perubahan positif melalui pelatihan ini. Hal ini sejalan dengan teori reintegrasi sosial Sampson dan Laub (1993) yang menekankan pentingnya penerimaan sosial dalam proses pemulihan mantan narapidana. Dengan memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar, WBP memiliki peluang lebih besar untuk diterima kembali di masyarakat.

Program ini juga berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan poin 16 (Perdamaian dan Keadilan Inklusif). Dengan mengurangi tingkat pengangguran di kalangan mantan WBP, pelatihan ini dapat menekan angka residivisme dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Hasil ini memperkuat temuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2022) yang menyatakan bahwa program pemberdayaan ekonomi merupakan solusi efektif untuk memutus siklus kriminalitas.

Ke depan, program serupa perlu diperluas ke lebih banyak Lapas dengan melibatkan lebih banyak mitra strategis, seperti perbankan dan asosiasi pengusaha. Evaluasi jangka panjang juga diperlukan untuk mengukur dampak program terhadap pengurangan residivisme dan peningkatan kesejahteraan mantan WBP. Dengan demikian, transformasi WBP menjadi individu yang bebas dan berdaya secara ekonomi dapat terwujud secara berkelanjutan.

PENUTUP

Program pelatihan akuntansi dan kewirausahaan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) terbukti efektif dalam meningkatkan literasi keuangan, motivasi berwirausaha, dan kesiapan reintegrasi sosial-ekonomi peserta setelah bebas. Melalui pendekatan partisipatif dan experiential learning, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman praktis yang relevan dengan dunia usaha. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan minat berwirausaha hingga 70% dan kemampuan WBP dalam membuat pencatatan keuangan dasar. Kolaborasi multipihak, termasuk pihak Lapas dan instansi pendukung lainnya, menjadi faktor penting dalam keberhasilan dan keberlanjutan program. Meski dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan waktu pelatihan dan perbedaan latar belakang pendidikan peserta, program ini berhasil diatasi dengan strategi pengajaran yang adaptif. Selain memberikan dampak ekonomi, pelatihan ini juga turut mengurangi stigma sosial terhadap mantan narapidana serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 8 dan 16. Ke depan, program serupa perlu direplikasi di lebih banyak Lapas dengan penguatan dukungan pascapelatihan agar transformasi WBP menjadi individu yang mandiri dan produktif dapat terwujud secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022). *Laporan Tahunan Reintegrasi Narapidana*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Israel, B. A., Schulz, A. J., Parker, E. A., & Becker, A. B. (2012). *Community-based participatory research: A strategy for building healthy communities*. University of California, Berkeley.
- Kolb, D. A. (2014). *Experiential Learning: Experience As The Source Of Learning And Development*. Pearson.
- Kuratko, D. F. (2020). *Entrepreneurship: Theory, Process, Practice*. (11th ed.). Cengage Learning.
- Maruna, S. (2001). *Making good: How ex-convicts reform and rebuild their lives*. American Psychological Association.
- Sampson, R. J., & Laub, J. H. (1993). *Crime In The Making: Pathways And Turning Points Through Life*. Harvard University Press.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. (2021). *Financial and Managerial Accounting*. Cengage Learning.